

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2016-2018**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Akuntansi
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Disusun Oleh :

Septiyani Eka Putri

NIM. 161020064

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Penyusun : Septiyani Eka Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 161020064
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : " Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018"

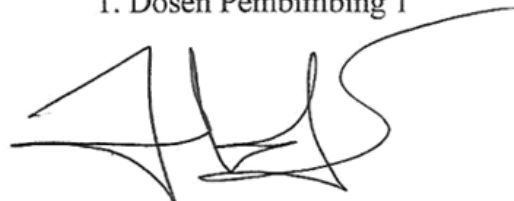
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dosen Penguji 1



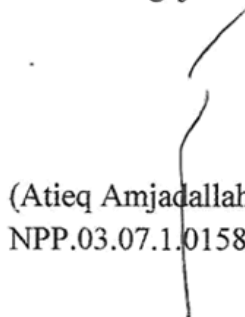
(Khanifah, SE.,M.Si.,Akt.,CA)
NPP.03.05.1.0131

1. Dosen Pembimbing 1



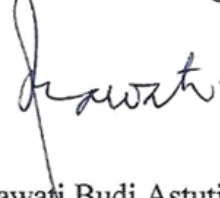
(Hasan, SE.,M.Sc)
NPP.03.05.1.0125

2. Dosen Penguji 2



(Atieq Amjadallah Alfie, SE.,M.Si)
NPP.03.07.1.0158

2. Dosen Pembimbing 2




(Ernawati Budi Astuti, SE.,M.Si)
NPP. 197610132005012002

Semarang, 23 September 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi




(Khanifah, SE.,M.Si.,Akt.,CA)
NPP.03.05.1.0131

BIODATA DIRI

I. DATA PRIBADI

1. NAMA : SEPTIYANI EKA PUTRI
2. ALAMAT : SADENG RT5 RW1
GUNUNGPATI, SEMARANG
3. TEMPAT & TANGGAL LAHIR : SEMARANG, 16 MARET 1998
4. KEWARGANEGARAAN : WNI
5. JENIS KELAMIN : Perempuan
6. AGAMA : ISLAM
7. NOMOR TELEPON : 0895360002925
8. ALAMAT EMAIL : Ekap866@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	PENDIDIKAN	ALAMAT	TAHUN
1.	SD NEGERI SADENG 01 SEMARANG	SEMARANG	2004 - 2010
2.	SMP NEGERI 41 SEMARANG	SEMARANG	2010 - 2013
3.	SMA NEGERI 7 SEMARANG	SEMARANG	2013 - 2016

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya Septiyani Eka Putri yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2016-2018”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kata atau gagasan, pemikiran penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak sebagian atau keseluruhan tulisan saya tiru dan saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pemilik aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak disengaja, dengan ini saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 22 Agustus 2020



Septiyani Eka Putri

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak dan ibu yang telah berjuang dan berdoa untuk semuanya.
2. Adik kandungku Ahbar Ramadhani yang tak henti memberikanku semangat.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungan dalam penulisan karya tulis ini.
4. Sahabat – sahabatku “penting tapi rak penting“ yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
5. Teman-temanku dari akuntansi A2 dan Akuntansi keuangan A2 yang selalu menjadi alasan untuk dapat lulus dengan tepat waktu agar bisa wisuda bersama.
6. Dosen dan pembimbing dari fakultas ekonomi yang dengan sabar selalu membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7. Almamaterku tercinta Universitas Wahid Hasyim Semarang, Terimakasih.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effect of local government financial performance on the allocation of capital expenditures in Central Java Province for the period 2016-2018. The population used in this study were all districts and cities in the province of Central Java for the period 2016-2018, namely for 3 years. The method used in sampling is purposive sampling with the criteria of all districts and cities that publish budget realization reports and APBD on their respective websites. Data analysis used in this study is the classical assumption test, Multiple Linear Analysis and Hypothesis Test or partial t test. The test results in this study indicate that the regional financial performance variable, namely the degree of decentralization, has a positive and significant effect on the allocation of capital expenditures.

Keywords: Degree of decentralization, financial independence, effectiveness of PAD, degree of BUMD contribution, and allocation of capital expenditures.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018 yaitu selama 3 tahun. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria seluruh kabupaten dan kota yang mempublikasikan laporan realisasi anggaran dan APBD di website masing-masing. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, Analisis Linier Berganda dan Uji Hipotesis atau uji t parsial. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah yaitu derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata kunci : Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD, dan alokasi belanja modal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sholawat serta salam penulis junjungkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016 -2018”** dengan baik dan benar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan yang melibatkan beberapa pihak yang mendukung, memberi semangat dan memberi masukan terhadap penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Ibu Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim,
3. Bapak Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim,
4. Bapak Hasan, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing pertama dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang dengan arif dan kesabarannya telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, nasehat dan bimbingannya.
5. Ibu Ernawati Budi Astuti, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing kedua dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang dengan arif dan kesabarannya telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, nasehat dan bimbingannya.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hayim Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan selama masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tidak pernah berhenti untuk anak-anaknya.
8. Tak lupa kepada sahabat-sahabat, teman-teman akuntansi A2 serta teman-teman yang selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan menyelesaikan kuliah ini sampai akhir, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabatku tersayang “Penting Tapi Rak Penting” (Dina, Erny, Afifah, Dian, Diyah, Bella, Vina, Ade, dan Tita) yang telah yang menjadi sahabat terbaik dan teman berbagi penulis.
10. Dan pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

“Kesempurnaan hanyalah milik Allah”, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Waassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Maret 2020



(Septiyani Eka Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BIODATA DIRI.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i> dalam Organisasi Pemerintah	10
2.1.2 Teori Penganggaran	11
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	12
2.1.4 Alokasi Belanja Modal	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Hipotesis	25
2.4.1 Pengaruh Rasio derajat desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal	25
2.4.2 Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.....	26

2.4.3	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal	26
2.4.4	Pengaruh Rasio Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal....	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	28
3.1.1	Variabel Penelitian.....	28
3.1.2	Definisi operasinal Variabel.....	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	31
3.2.1	Populasi.....	31
3.2.2	Sampel.....	32
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	35
3.4	Metode pengumpulan data.....	36
3.5	Metode Analisis	36
3.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.2	Analisis Regresi Berganda.....	42
3.5.3	Uji Hipotesis	43
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Uji Asumsi Klasik.....	44
4.1.1	Uji Normalitas.....	44
4.1.2	Uji Multikolinieritas.....	46
4.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.1.4	Uji Autokorelasi	51
4.2	Analisis Linier Berganda	52
4.3	Uji Hipotesis	54
4.3.1	Uji t parsial	56
4.4	Pembahasan	57
4.4.1	Pengaruh Rasio derajat desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal	57
4.4.2	Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal	58
4.4.3	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal	58
4.4.4	Pengaruh Rasio Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal....	59
BAB V	60

PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran	62
Daftar pustaka	64

DAFTAR TABEL

1.1 Research Gaap	5
2.1 Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah.....	15
2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	17
2.3 Penelitian Terdahulu	20
3.1 Definisi Operasional Variabel	29
3.2 Kriteria Penentuan Sampel	33
3.3 Daftar Sampel kabupaten dan kota di Jawa Tengah	33
3.2 Kriteria Penentuan Sampel	33
4.1 Hasil Uji Normalitas	45
4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	47
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (uji Glesjer).....	50
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	52
4.5 Analisis Linier Berganda	53
4.6 Hasil Uji Hipotesis (uji t parsial)	56

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	24
4.1 Uji Normalitas.....	46
4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permendagri No. 13, 2006). Pembangunan diperlukan agar daerah juga dapat maju seperti kota-kota besar, hal ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga Pemerintahan Daerah agar dapat mewujudkan keinginan tersebut. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah tanpa ada batasan untuk pembangunan dan pengembangan Pemerintahan yang lebih baik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang keuangan daerah. Ketentuan pasal 293 dn pasal 330 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, agar semua orang mengetahuinya, oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan Daerah sendiri merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, maupun barang yang dapat digunakan sebagai kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak – pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2008). Sesuai Pemendagri N0. 32 tahun 2011, keuangan daerah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ,maupun berupa barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kemampuan keuangan daerahnya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja modal. Belanja modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan atau biasa disebut belanja modal (Priyo, 2006). Faktor belanja modal meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dan meningkatkan tingkat pelayanan masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para penyumbang dana atau investor. Semakin besar alokasi belanja modal maka semakin serius pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat daerah.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi suatu belanja daerah. Faktor-faktor seperti masalah politik, kondisi keuangan daerah, dan perilaku oportunistik dari para pemangku kebijakan dapat mempengaruhi alokasi suatu belanja (Hidayat, 2013). Faktor yang paling dapat diukur secara empiris adalah faktor yang terkait keuangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian belanja modal. Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari sebuah hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Azhar, 2010). Analisis kinerja keuangan pada umumnya digunakan untuk menilai kinerja di masa lalu untuk memperoleh keadaan keuangan yang sesuai dengan kemampuan untuk menggali potensi agar kinerja bisa terus berlanjut.

TABEL 1.1
Research Gap

No	Variabel	Berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal	Tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
1	Derajat desentralisasi	Eko Indra Praza (2016)	Havid Sularso dan Yanuar Restianto (2011)
2	Kemandirian keuangan daerah	Prihastuti, Taufeni, dan Restu Agusti (2015)	I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015)
3	Efektivitas PAD	I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015)	Kadek Martini dan Dwirandra (2015)
4	Derajat kontribusi BUMD	Kadek Martini dan Dwirandra (2015)	I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015)

sumber: diolah (2020)

Penelitian ini akan membahas pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, *debt service coverage ratio*, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio kontribusi BUMD (Hidayat, 2013). Dalam menganalisis kinerja keuangan maka penelitian ini difokuskan pada empat indikator rasio keuangan daerah yaitu, rasio derajat desentralisasi, rasio

kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD dengan pertimbangan:

1. Rasio ketergantungan dan kemandirian bersifat *trade off*, jadi peneliti memilih memakai salah satu diantaranya yaitu kemandirian keuangan.
2. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.
3. Rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
4. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
5. Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018**”. Pemilihan provinsi Jawa Tengah karena pada saat ini Jawa Tengah sedang mengembangkan potensi wisata daerah yang diharapkan nantinya akan menarik minat pengunjung lokal maupun mancanegara untuk leboh mengenal daerah Jawa Tengah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan yang sudah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
2. tApakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
3. Apakah efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
4. Apakah derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh derajat desentralisasi terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Mengetahui pengaruh kemandirian keuangan terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Mengetahui pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal.
4. Mengetahui pengaruh derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pengalokasian belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademisi

1. Membuka wawasan mahasiswa terkait
2. Menambah khasanah kepustakaan mengenai keuangan daerah secara umum.

b. Praktisi

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti sehubungan pengaruh kinerja keuangan ketergantungan keuangan terhadap pengalokasian belanja modal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, kinerja keuangan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sehubungan dengan pengaruh kinerja keuangan derajat desentralisasi terhadap pengalokasian belanja modal.

c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pelaku bisnis untuk mendukung kinerja keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini penulis akan memaparkan sistematika perencanaan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan tentang penegasan judul secara rinci, latar belakang permasalahan yang diangkat dalam skripsi, perumusan masalah penelitian seperti apa, manfaat dari penelitian dan tujuan dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai Variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini yaitu dibagi atas variabel bebas yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio derajat kontribusi BUMD, alokasi belanja modal dan juga teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, yang meliputi teori tentang keuangan daerah, teori tentang organisasi Pemerintah dan beberapa penelitian ataupun kajian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan juga metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* dalam Organisasi Pemerintah

Teori keagenan adalah teori tentang suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen (Hidayat,2013). Teori keagenan sering disebut sebagai teori prinsipal-agen. Teori principal agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik (Halim dan Abdullah, 2006).

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang

kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Ardhini dan Handayani, 2011).

2.1.2 Teori Penganggaran

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich dalam Abdullah, 2004). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya (Rubin dalam Abdulllah, 2004). Mardiasmo (2009) menyatakan pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan berikut:

1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Anggaran sangat berguna bagi kebutuhan perencanaan organisasi. Anggaran dapat membuat para politisi dan pimpinan perusahaan untuk berpikir ke depan dan untuk membuat keputusan tentang kinerja apa yang harus dicapai sekaligus menghabiskan sumber daya yang tersedia. Anggaran juga dapat dijadikan alat pengendalian dalam hal mengawasi penggunaan uang oleh manajer. Lebih lanjut lagi, anggaran juga dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang memungkinkan terjadinya komunikasi tentang tujuan dan prioritas organisasi. Terakhir, anggaran juga berguna untuk memotivasi para manajer, karena target yang sudah dianggarkan dan ditetapkan akan berhubungan dengan evaluasi kinerja nantinya (Budding dan Grossi, 2015).

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 pasal 1 ayat 37 (perubahan kedua dari Pemandagri No.13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan Pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan pencapaian dari suatu hasil kerja dalam bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan Perundang-undangan dari satu periode anggaran (Prihastuti dkk, 2015).

Inti dari sebuah pengukuran kinerja sangat sederhana, yaitu sebuah organisasi publik merumuskan target kinerja yang ingin dicapai dengan berbagai pertimbangan dan juga mengindikasikan bagaimana kinerja ini dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja (de Bruijn, 2002). Kinerja keuangan pada daerah dapat diukur dari berbagai analisis rasio keuangan. Analisis keuangan pada APBD dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah antara lain sebagai berikut:

2.1.3.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah (Mahmudi, 2010). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010).

Pendapatan daerah menurut permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih”. Kelompok pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan asli daerah menurut Halim (2013:101) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu “pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Menurut Mahmudi (2016:140) rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.3.2. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah atau derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Hidayat, 2013). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsiserta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016). Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.3.3.Rasio Efektivitas PAD

Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari PAD harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah (Sianturi dkk, 2014). Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Hidayat, 2013). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut

Tabel. 2.2
Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.1.3.4. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total Pendapatan

Asli Daerah (Mahmudi, 2016:143). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim (2013:104) merupakan “penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Penerimaan bagian laba BUMD

$$\text{Rasio Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan bagian laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.1.4 Alokasi Belanja Modal

Menurut Warren (2008:450), Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 (perubahan pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004). Alokasi Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD. Alokasi belanja modal dihitung dengan formula sebagai berikut ;

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, berikut disajikan beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sularso dan Restianto (2011)	Dependen : Alokasi Belanja Modal. Independen 1. derajat desentralisasi 2. ketergantungan keuangan 3. kemandirian keuangan 4. efektivitas PAD 5. derajat kontribusi BUMD	Hasil penelitian ini adalah ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Sylvia Febriany G ,David P.E. Saerang, dan Winston Pontoh (2012)	Dependen : Alokasi Belanja Modal. Independen 1. Ketergantungan keuangan daerah. 2. Kemandirian keuangan daerah. 3. Efektivitas PAD. 4. Efektifitas belanja modal. 5. Efisiensi keuangan daerah.	1. Dengan Analisis Regresi Sederhana Kemandirian keuanagan daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi keuangan daerah, Keserasian belanja berpengaruh signifikan terha-dap Alokasi belanja modal. 2. Dengan Analisis Regresi Sederhana Ketergantungan keuangan daerah, dan Efekti-vitas belanja modal tidak berpengaruh signifikan terha-dap Alokasi belanja modal. 3. Dengan uji F Variabel Kemandirian keuangan daerah,Ketergantungan keuangan

			daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas belanja modal, Efisiensi keuangan daerah, Keserasian belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja modal.
3	Asepma Hygi P, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti (2015)	<p>Dependen : Alokasi Belanja Modal.</p> <p>Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio derajat desentralisasi 2. Rasio ketergantungan keuangan 3. Rasio kemandirian keuangan 4. efektivitas PAD 5. Rasio aktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan secara langsung memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan sumbangan sebesar 59,29%. 2. Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Kinerja keuangan secara langsung memiliki signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sumbangan 30,25% 4. Kinerja keuangan secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) tidak berpe-ngaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Ketut Arsa, dan Nyoman Djinar Setiawina (2015)	<p>Dependen : Alokasi Belanja Modal.</p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat desentralisasi 2. Rasio ketergantungan keuangan 3. Derajat kontribusi BUMD 4. Rasio kemandirian keuangan 5. Efektivitas PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. 2. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. 3. Derajat desentralisasi keuangan dan efektivitas PAD, secara tidak langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal dan ketergantungan keuangan, secara tidak

			langsung berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
5	Kadek Martini, dan A.A.N.B Dwiranra (2015)	<p>Dependen : Alokasi Belanja Modal.</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan Keuangan Daerah, 2. Tingkat Pembiayaan SiLPA, 3. rasio kontribusi BUMD. 4. efektivitas PAD, 5. rasio ruang fiskal, 6. rasio efesiensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Ketergantungan, Rasio Tingkat pembiayaan SiLPA, dan Rasio efesiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada Alokasi belanja modal. 2. Rasio efektivitas PAD, dan Rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Alokasi belanja modal. 3. Rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada Alokasi belanja modal.
6	Eko Indra Praza (2016)	<p>Dependen : Alokasi Belanja Modal.</p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio derajat desentralisasi 2. Rasio ketergantungan 3. Rasio derajat kontribusi BUMD 4. Rasio kemandirian keuangan 5. Rasio efektivitas PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara simultan berpe-ngaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. 2. Dengan metode Fixed Effect Model (FEM) secara Parsial Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Ketergantungan Keuangan dan Rasio Keman-dirian keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

			Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
--	--	--	--

sumber: diolah (2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada pemilihan variabel bebas yang dipakai dan definisi operasional alokasi belanja modal. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

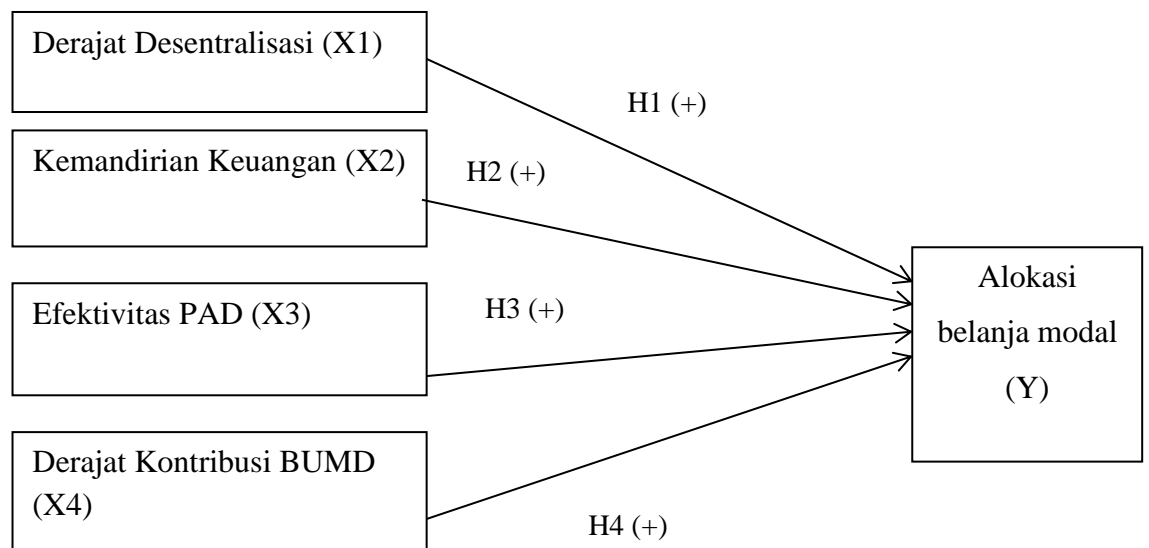
1. Rasio ketergantungan dan kemandirian bersifat *trade off*, jadi peneliti memilih memakai salah satu diantaranya yaitu kemandirian keuangan.
2. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.
3. Rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
4. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
5. Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik juga agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam model dibawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



sumber: diolah (2020)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini, dan ditujukan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan Derajat kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal. Dari keempat ukuran kinerja keuangan daerah tersebut, nantinya akan diketahui ukuran kinerja keuangan daerah mana yang paling berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan hasil penelitian sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, ditentukan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Rasio derajat desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eko Indra Praza (2016) menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut Pemerintah berhasil menyelenggarakan desentralisasinya dengan baik.

H1: Derajat desentralisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

2.4.2 Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan teori dan berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan, tingkat kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011), dan penelitian Prihastuti dkk (2015). Tingkat kemandirian keuangan daerah dinilai dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah karena semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pemerintahannya sendiri cukup baik, maka seharusnya belanja modal yang dianggarkan daerah tersebut tinggi.

H2: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Pada penelitian Hidayat (2013) dan penelitian Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Realisasi PAD yang tinggi pada suatu daerah diharapkan dapat selaras dengan meningkatnya alokasi belanja modal di tahun anggaran berikutnya.

H3: Efektivitas PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.4.4 Pengaruh Rasio Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Kadek Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa rasio derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto.

H4: Derajat kontribusi BUMD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a sun-like symbol in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pengalokasian belanja modal di provinsi Jawa Tengah periode 2016- 2018, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya pada rasio derajat desentralisasi. Berdasarkan hasil pengujian variabel Derajat Desentralisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Dengan penelitian menggunakan uji t mendapatkan hasil nilai koefisien regresi 4,691 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.
2. Berdasarkan hasil pengujian variabel kemandirian keuangan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Dengan penelitian menggunakan uji t mendapatkan hasil nilai koefisien regresi (-0,989) dan nilai signifikan $0,325 > 0,05$.
3. Berdasarkan hasil pengujian variabel secara parsial pengujian hipotesis pengaruh efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan penelitian uji t mendapatkan hasil koefisien regresi 1,020 dan tingkat signifikan $0,310 > 0,05$.
4. Berdasarkan hasil pengujian variabel secara parsial pengujian hipotesis pengaruh derajat kontribusi BUMD tidak memiliki pengaruh

terhadap alokasi belanja modal. dengan penelitian menggunakan uji t diperoleh hasil koefisien regresi 0,991 dan tingkat signifikan 0,324 > 0,05.

5. Dalam penelitian ini hanya 1 variabel kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan 4 variabel lainnya sama sekali tidak berpengaruh. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Dalam penelitian ini kontribusi PAD yang terjadi terbilang tinggi 15,003%, maka kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi juga tinggi.

5.2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapat hasil yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan 35 sampel kabupaten dan kota di Jawa Tengah hanya dalam jangka waktu 3 tahun saja yaitu dari tahun 2016 sampai 2018, sehingga data yang diambil terdapat kemungkinan kurang mencerminkan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Sampel penelitian ini hanya berpusat pada kota dan kabupaten yang mempublikasikan laporan APBD dan laporan realisasi anggaran tahun 2016-2018 dalam situs Dirjen Perimbangan Keuangan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel saja dari kinerja keuangan daerah yaitu, variabel derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dalam struktur APBD yang kemungkinan bisa lebih mempengaruhi seperti, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ruang fiskal dan rasio efisiensi.

5.3. Saran

Peneliti menyadai bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan indikator untuk mengukur kinerja keuangan dan menggunakan periode penelitian yang berbeda serta memperluas lokasi penelitian tidak hanya di kota atau kabupaten di Jawa Tengah saja.
2. Untuk pemerintah daerah sebaiknya lebih berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dapat memberikan dampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah.
3. Pemerintah juga sebaiknya lebih jeli dalam menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD sehingga dapat tercipta keuangan daerah yang mandiri sesuai tujuan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, dkk. 2017. Analisis Kinerja Keuangan dan Belanja Mdal Pemerintah daerah (st
- Ardini Dan Sri Handayani. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Public Dalam Perspektif Teori Keagenan(Studi Pada Kota Dan Kabupaten Di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Asriani, 2016. Analisis Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Timur
- Arsa, I. K. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten atau Kota Se- Provinsi Bali Tahun 2006 S.D 2013. Tesis S-2 Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Akiya, Ardan. 2011. Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi(studi pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal ilmiah* Universitas Sebelas Maret.
- Darwanto, dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Laporan Realisasi Anggaran*.
<http://www.djpk.depkeu.go.id>

DJPK. (2020). *Deskripsi dan Analisis APBD 2016 sampai 2018*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Eko, I.P., (2016).). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi.

Fitriyani Dan Pratolo. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Pada Rasio Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi.

Hafidh, Aula Ahmad. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2,109-120.

Hidayat, M. F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).

Kurniawan, D. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kota atau kabupaten di Sumatra Barat dalam era Otonomi Daerah. Tesis Universitas Andalas.

Martini, K., dan Dwirandra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 426-443.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Nelanja Daerah (Studi Empiric Di Wilayah Jawa Tengah Dan DIY).
- Prihastuti, A. H., Taufik, T., dan Agusti, R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *LPPM Universitas Riau*, 148-153.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Sularso, H., dan Restianto, Y. M. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Suwandi, Kurni Adi dan Tahar, Afrial (2015), Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal Variabel Intervening (studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota D.I. Yogyakarta).

Vella KF, M. rasuli, dan Alfiati Silfi. 2014. Pengaruh rasio keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan Dana alokasi umum (DAU), terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten dan kota di provinsi Riau tahun 2009-2012. Jurnal ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Riau . Riau.